

Konstruksi Wacana Pandangan Ekspatriat Perancis dan Australia di Bali dan Surabaya

Luh Putu Savitaresta Primasaty Arnaya

Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email: savitaresta.arnaya@gmail.com

Abstract

This research has begun by questioning the construction of discourse about religious intolerance in Indonesia among living French and Australian expats in the country. The fact that Indonesia's good image on religious tolerance is lately been distracted by two problems. First problem is violence against minority and the second one is violence that is done by religion-based organizations. In relation of those state's problems, the discourse among international society regarding the issue is quite urgent to be elaborated. Hence this research aims to explore the viewpoint of French and Australian expats in Bali and Surabaya on the discourse since they can be seen as the representation of international society that is living inside the territory. The argumentation that is offered then is the construction of religious intolerance discourse among living French and Australian expats in Bali and Surabaya is related to two things. Those are the historical aspects and the relation between the state and religious groups. After doing an in-depth interview with the expats, the result in the form of discourse is then compared based on similarities and differences. Finally, the comparison is analyzed and resulted that the discourse among communities cannot part from its construction that is built from intersubjectivity.

Key Words: Discourse, Construction, Religion, Expatriate, Intolerance, Indonesia, France, Australia.

Pendahuluan

Indonesia tidak mendeklarasikan diri sebagai negara agama, akan tetapi agama menjadi variabel penting bagi masyarakat dan perpolitikan dalam negeri. Sejarah dan berbagai dinamika didalamnya telah mengantarkan Indonesia kepada pluralisme dengan setidaknya enam agama tumbuh dan berkembang sebagai praktik masyarakatnya. Enam agama tersebut adalah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Di tengah keberagaman agama yang ada, tantangan terbesar bagi Indonesia kemudian ialah menjaga toleransi antar umat beragama. Berbagai kebijakan dan hukum telah mendorong upaya akan hal itu. Misalnya, pasal 29 dalam Undang-undang Dasar 1945 dan penanaman slogan Bhineka Tunggal Ika sejak dini di sekolah-sekolah formal. Dalam hal ini, Indonesia telah dikenal

oleh dunia internasional sebagai negara dengan tingkat toleransi yang tinggi terhadap keberagaman agama. Penobatan Indonesia sebagai teladan dalam praktik toleransi beragama pernah diberikan oleh yayasan bernama *Appeal of Conscience Foundation* (Schonhardt, 2013). Hal tersebut menandakan bahwa citra Indonesia di mata masyarakat internasional sangat baik dalam menjaga toleransi beragama. Terlebih Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, mengatakan bahwa Indonesia dapat hidup harmonis ditengah keberagaman agama yang tinggi.

Akan tetapi, keharmonisan yang diklaim oleh pemerintah dan citra baik yang telah lama terbangun tersebut belakangan mulai dipertanyakan. Penyebab utamanya adalah tidak lain karena terdapat beberapa kasus kekerasan yang menimpa kelompok agama minoritas dan tidak jarang

dilakukan oleh organisasi masyarakat yang mengatasnamakan agama. *Human Rights Watch* (HRW) menaruh perhatian besar pada kekerasan yang dilakukan oleh ormas-ormas yang mengatasnamakan agama di Indonesia seperti Front Pembela Islam (FPI). FPI beberapa kali diberitakan melancarkan serangan kepada kaum minoritas ataupun hal-hal lain yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran yang mereka percaya. Contoh nyatanya adalah aksi turun ke jalan untuk menolak kedatangan perwakilan dari Aliansi Nasional Antaragama untuk Kebebasan Beragama dan Agama ke Indonesia (Kine, t.t.). Aksi lain juga banyak dilakukan dengan cara mengancam membakar tempat ibadah milik kelompok agama minoritas yang dianggap agama sesat karena tidak diakui sebagai agama resmi oleh Kementerian Agama. Berdasarkan data milik Institut Setara, terdapat 220 kasus kekerasan terhadap agama minoritas yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia pada tahun 2013 (Rogers, 2015). Beberapa diantaranya dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama, pemerintah daerah setempat, ataupun oknum tertentu. Dari latar belakang yang beragam, kebanyakan karena ketiadaan izin bagi kelompok minoritas untuk membangun tempat ibadah di daerah tertentu seperti yang terjadi terhadap kelompok agama Protestan yang membangun gereja di Singkil, Aceh (Lamb, t.t.).

Respon dan kritik kemudian terus bermunculan pada skala global, dari yang hanya mengkritik hingga mengecam Indonesia. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada citra Indonesia di mata dunia internasional. Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, merespon dengan memperingatkan agar umat Muslim dan Kristen dapat menjaga toleransi antarumat beragama ketika berpidato pada kunjungannya ke Indonesia tahun 2010 (MacAskill dan Loughlin, 2010). Respon juga datang dari organisasi non-pemerintahan seperti HRW yang menunjukkan grafik peningkatan dari

tahun 2010 hingga 2012. HRW pun selanjutnya mengecam pemerintah Indonesia karena dianggap tidak acuh dalam melihat berbagai kasus kekerasan yang terjadi (HRW, t.t.). Selain itu, terdapat beberapa media global yang memproduksi tulisan dengan menyebut Indonesia tidak lagi dapat dijadikan panutan dalam hal toleransi beragama. Pemerintah pun kerap dianggap sebagai aktor yang bertanggung jawab atas segala kekerasan atau intoleransi agama yang terjadi beberapa tahun belakangan di Indonesia.

Selain menjadi bahan pembicaraan bagi media global dan masyarakat internasional yang berada di luar wilayah Indonesia, praktik antar umat beragama juga menjadi isu bagi para ekspatriat yang tinggal di Indonesia. Hal ini dikarenakan para ekspatriat terbiasa untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal dan merasakan dampak langsung dari segala fenomena yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, para ekspatriat di Indonesia dapat dikatakan menjadi masyarakat internasional yang paling dekat dengan isu peningkatan intoleransi agama di dalam negeri. Adapun dua dari sekian banyak komunitas ekspatriat yang tinggal di Indonesia adalah ekspatriat Perancis dan Australia. Disamping jumlah ekspatriat yang banyak di dalam teritorial Indonesia, Perancis dan Australia merupakan dua negara sekuler yang keberadaan agama dalam negerinya sangat berbeda dengan Indonesia. Australia sendiri memiliki sejarah yang pahit terhadap terorisme yang terjadi di Indonesia. Sedangkan Perancis, sama halnya dengan Indonesia, kerap kali diberitakan sebagai negara dengan toleransi beragama yang rendah (Amiriaux dan Mohammed, 2013). Penting kemudian untuk memperhatikan pandangan ekspatriat yang tersebar di daerah di Indonesia yang dapat merepresentasikan keberagaman agama di Indonesia. Surabaya dapat menjadi contoh terbaik untuk merepresentasikan umat Muslim sebagai kelompok mayoritas di Indonesia. Terlebih

karena beberapa peristiwa yang mengindikasikan intoleransi beragama terjadi di Surabaya. Salah satunya adalah penghancuran *sinagoga* di Surabaya yang merupakan tempat pertemuan komunitas penganut agama Yahudi (Bayuni, 2013). Berbeda dengan Surabaya, Bali merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Sebagaimana diketahui, Hindu merupakan agama minoritas di Indonesia. Selain itu, Bali juga telah lama menjadi tuan rumah bagi para ekspatriat dari banyak negara. Tidak seperti Surabaya yang banyak diberitakan menjadi tempat peristiwa kekerasan agama, Bali tidak pernah mengalami konflik agama secara fisik. Akan tetapi, belakangan Bali tidak luput dari pemberitaan tentang penistaan agama yang terjadi di media sosial. Berbekal pengalaman tinggal di dua daerah di Indonesia yang memiliki perbedaan situasi dan pengalaman terhadap fenomena intoleransi beragama, pandangan ekspatriat Perancis dan Australia kemudian dapat dieksplorasi demi mengetahui konstruksi wacana intoleransi beragama yang berkembang di kalangan kedua ekspatriat tersebut.

Dalam studi Hubungan Internasional, penelitian mengenai wacana atau diskursus merupakan hal yang baru mengingat basis-basis penelitian tidak kemudian dapat disamakan dengan penelitian positivis pada umumnya. Paska Perang Dingin, bahasa menjadi unit analisis yang penting dalam HI mengingat bahasa pada perkembangannya tidak hanya digunakan sebagai fungsi komunikasi, tetapi juga representasi dan diplomasi. Liu Yongtao (2010: 86) menjelaskan bahwa bahasa memiliki makna yang dapat menggambarkan praktik dalam kehidupan sosial dan merekonstruksi realita sosial. Penjelasan tersebut membuat bahasa, atau dalam tingkat lanjut adalah wacana, kemudian memiliki fungsi sesuai dengan aktor yang menggunakannya. Oleh sebab itu, sesuai dengan pernyataan Audie Klotz

dan Cecelia Lynch (2007: 10) yang menyebutkan bahwa wacana tidak dapat terlepas dari konstruksi sosial yang membentuknya. Dalam artian, wacana merupakan hasil dari intersubjektivitas antara identitas aktor, konteks, *power*, dan pengetahuan (*knowledge*).

Studi tentang wacana dalam Hubungan Internasional berfungsi untuk menemukan diferensiasi yang dapat menjelaskan fenomena tertentu. Misalnya, fenomena intoleransi beragama di Indonesia yang wacananya diproduksi oleh beberapa media global hingga memunculkan berbagai respon dan kritik dari masyarakat internasional. Intoleransi beragama yang ditandai dengan kekerasan agama di suatu negara dapat dilihat sebagai sebuah fenomena penting. Terlebih ketika kekerasan agama justru terjadi di negara berkembang dengan tingkat keberagaman agama yang tinggi. Michael Walzer (1997: 66) berasumsi dengan berkaca pada keberhasilan Amerika Serikat yang juga pluralis namun dapat meminimalisir kekerasan agama. Asumsinya adalah di beberapa negara, faktor agama telah terkontaminasi oleh faktor nasionalisme, etnisitas, dan sejarah suatu negara sehingga tidak jarang menciptakan masyarakat yang dekat dengan fanatisme agama. Selain itu, peran negara juga menjadi faktor utama keberhasilan Amerika Serikat, yakni dengan melemahkan kontrol komunal, membatasi otoritas pemuka agama, individu yang sadar akan kebebasan agama, meminimalisir hubungan individu dengan komunitas agama, serta terdapat pernikahan yang tidak terbatas pada kesamaan agama, ras, ataupun kasta (Walzer, 1997: 67-68). Robert A. Dowd (2015) kemudian menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya satu-satunya aktor yang berperan dalam negara, melainkan juga tokoh agama yang harus suportif terhadap demokrasi dan keberagaman agama. Jika diurutkan, maka argumentasi untuk menjawab pertanyaan mengenai konstruksi wacana intoleransi beragama di Indonesia, di kalangan ekspatriat

Perancis dan Australia, di Bali, dan Surabaya adalah terkait dengan dua aspek, yaitu aspek historis Indonesia dan relasi negara dengan kelompok beragama di Indonesia.

Wacana Ekspatriat Perancis

Diskursus bisa jadi diproduksi secara verbal maupun in verbal melalui tulisan dan dokumen-dokumen lainnya (Neubert dan Reich, 2002). Wacana intoleransi beragama di Indonesia telah ramai berkembang dikalangan media global dan skala pemerintahan di dunia internasional baik secara verbal maupun in verbal. Maka, penelitian ini berfokus pada wacana secara verbal dengan metode wawancara mendalam secara langsung atau *in-depth interview*. Hal ini dilakukan untuk keperluan eksplorasi terhadap pandangan ekspatriat sehingga tidak semata-mata memetakannya. Terdapat setidaknya tiga ekspatriat Perancis yang menjadi partisipan wawancara. Ketiganya memiliki latar belakang yang berbeda-beda untuk mendukung variasi dari pandangan ekspatriat itu sendiri. Ekspatriat pertama tidak ingin identitasnya dipublikasikan, namun dapat dipastikan bahwa ekspatriat pertama bergerak di bidang edukasi di Bali dan sedikit banyak memiliki keterkaitan dengan pemerintah Perancis di Indonesia. Ekspatriat Perancis kedua bernama Olivier Meslin yang telah 29 tahun tinggal di Bali dan bekerja di sektor ekspor-impor. Sedangkan ekspatriat ketiga bernama Michel Bourdin yang merupakan seorang pengajar Bahasa Perancis di IFI Surabaya.

"I can see for example in Indonesia we understand that he's a young country trying to find his own way after the *dictateur*" (Anonim, wawancara pribadi, 2016). Ekspatriat Perancis pertama mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang yang tidak luput dari dinamika perpolitikan dalam negeri sehingga wajar apabila konflik kerap terjadi. Salah satu yang berada dalam

konstruksi wacana ekspatriat adalah pemerintah Indonesia yang diktator. Pemerintah yang diktator telah menciptakan berbagai konflik agama di beberapa daerah di Indonesia, terutama tendensi antara umat Muslim dan Kristen di Sulawesi, Sumatera, dan Jawa yang terjadi hingga tahun 2006. Sejarah Indonesia tidak hanya menghasilkan transisi politik yang satu garis lurus dengan fenomena intoleransi beragama di Indonesia, ekspatriat Perancis juga menganggap sejarah Indonesia menjadikan masyarakat Indonesia terbagi menjadi beberapa komunitas, seperti kelompok-kelompok agama dan daerah-daerah yang terbagi serta memiliki perbedaan tradisi antara satu sama lain. Berbekal pengalaman tinggal dan berkunjung ke beberapa daerah di Indonesia, ekspatriat Perancis dapat menjelaskan fenomena kehidupan beragama di Indonesia secara keseluruhan. Michel Bourdin yang pernah berkunjung ke Toraja mengatakan bahwa masyarakat Toraja lebih mengedepankan tradisi daripada perbedaan agama yang ada. "I think, uh, what Torajan told me...okay we are Muslims and Christians here and never mind the most important is the tradition than being Muslim or Christian is really something in your heart and the most important is the tradition and the community" (Bourdin, wawancara pribadi, 2016). Hal ini kemudian berbeda dengan keadaan daerah lainnya di Indonesia. Begitu pun dengan Olivier Meslin yang mengaku sering berkunjung ke Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Olivier mengatakan bahwa beberapa daerah di Indonesia mengindikasikan Indonesia semakin bergerak ke arah konservatisme. Terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan praktik agama yang semakin religius oleh masyarakat. Perbedaan praktik agama di daerah-daerah di Indonesia selanjutnya menghasilkan tingkat toleransi yang berbeda pula. Bali, misalnya, disebut ekspatriat sebagai daerah yang nihil kekerasan agama. Maka berbeda dengan daerah-daerah di Jawa yang menurut ekspatriat kerap terjadi kekerasan agama karena dekat

dengan radikalisme dan konservatisme agama.

Tidak hanya berbicara seputar aspek historis, wacana intoleransi beragama yang berkembang di kalangan ekspatriat Perancis juga memberikan pembingkai tersendiri terhadap peran pemerintah Indonesia. Adapun peran pemerintah dalam hal ini dilihat sebagai: (1) pembuat kebijakan; (2) badan yang menaungi berbagai organisasi dan kelompok masyarakat; dan (3) badan yang mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat melalui media dan edukasi. Sebagai seorang ekspatriat, Olivier dapat dengan mudah menyebutkan kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak kondusif dengan upaya pelestarian toleransi beragama. Diantaranya adalah kebijakan pelarangan penayangan film yang tidak sesuai dengan sejarah dan ajaran agama di Indonesia, himbauan pelarangan perayaan *valentine's day* oleh ormas, dan pelarangan penjualan bir serta minuman keras lainnya (Olivier, 2016). Selain itu, pemerintah juga dianggap bertanggung jawab atas kekerasan yang dilakukan ormas yang mengatasnamakan agama. Michel Bourdin mengaku merasakan langsung pengalaman buruk ketika rencana loka karya yang terpaksa harus dibatalkan karena tidak diberi izin oleh kepolisian dan ormas setempat. Hal ini disebabkan loka karya tersebut dinilai membawa ideologi komunis yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Institusi Setara (2015) bahkan mencatat masih ratusan kasus yang terhitung setiap tahunnya seputar peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Merespon hal ini, Michel Bourdin menilai pemerintah sebagai aktor yang toleran terhadap kelompok-kelompok intoleran. Namun ekspatriat Perancis juga mengatakan bahwa pemerintah tidak kemudian bergerak sendiri. Peran yang tidak kalah penting dalam menghindari intoleransi beragama juga diemban oleh media dan para pemuka agama. Hal ini dikarenakan keduanya dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat serta menjadi pihak yang

harus membantu sosialisasi segala kebijakan pemerintah.

Wacana Ekspatriat Australia

Sebuah penelitian yang mengedepankan deskripsi atas eksplorasi pandangan, maka wacana secara verbal juga digali melalui wawancara mendalam dengan ekspatriat Australia yang tinggal di Bali dan Surabaya. Ekspatriat pertama bernama Elizabeth Lenahan yang telah empat tahun tinggal di Bali dan berprofesi sebagai pengajar di salah satu lembaga kursus bahasa Inggris di Denpasar. Ekspatriat kedua adalah Vladimir Pejovic yang juga memiliki profesi yang sama dengan Elizabeth dan telah tinggal selama 25 tahun di Indonesia. Sedangkan ekspatriat Australia ketiga bernama Stephanie Black merupakan ekspatriat yang telah empat tahun tinggal di Surabaya, Malang, dan Jakarta.

Ketiga ekspatriat Australia pada umumnya mengaitkan aspek historis dalam wacana yang berkembang diantara ketiganya, namun aspek historis tersebut tidak kemudian menjadi penyebab utama dari fenomena intoleransi beragama yang terjadi di Indonesia. Ekspatriat Australia membenarkan bahwa terdapat beberapa daerah di Indonesia yang tingkat toleransinya lebih rendah daripada daerah lain. "...and then there are certain part of Indonesia that are less tolerant about different religions than others" (Lenahan, wawancara pribadi, 2016). Dengan berbekal pengalaman berkunjung ke beberapa daerah di Indonesia, Elizabeth membandingkan praktik agama Katolik yang berlangsung di Tanah Toraja dengan praktik agama Katolik di Makassar. Elizabeth melihat perbedaan ini disebabkan oleh faktor geografis yang menempatkan Tanah Toraja dengan mayoritas penduduk Katolik dan Makassar dengan mayoritas penduduk Islam sehingga praktik agama Katolik di kedua daerah menjadi berbeda. Terlebih lagi dua ekspatriat yang tinggal di Bali mengaku tidak pernah mengalami atau menyaksikan

tindak diskriminasi yang mengindikasikan intoleransi beragama. Selaras dengan Elizabeth, Vladimir juga tidak ingin menyebut Indonesia sebagai negara yang intoleran hanya dengan berkiblat pada konflik komunal atau kekerasan yang dilakukan oleh ormas agama. Vladimir pun tidak mengatakan konflik-konflik tersebut ialah hasil dari sejarah Indonesia, melainkan disebabkan oleh faktor ekonomi dan kepentingan kelompok tertentu. Bersamaan dengan pesimisme ekspatriat Australia dalam menyebut Indonesia sebagai negara yang intoleran, Stephanie Black berpendapat bahwa intoleransi justru tidak terjadi dalam hal keberagaman agama, melainkan keberagaman etnis. Secara sederhana, pandangan ketiga ekspatriat Australia disebabkan karena persamaan pengalaman yang dimiliki ketiganya, yakni tidak pernah mengalami bentuk intoleransi agama.

Sama halnya dengan ekspatriat Perancis, ekspatriat Australia juga meletakkan peran pemerintah dalam wacana intoleransi beragama. "I guess when it is regulated by the state, then it can influence people's choice" (Black, wawancara pribadi, 2016). Pernyataan tersebut menjadi sesuai dengan keadaan Indonesia dengan berbagai kebijakan yang membatasi berbagai kebebasan memeluk agama. Stephanie menggunakan kebijakan pemerintah yang hanya mengakui enam agama yang diatur secara sah oleh Kementerian Agama sebagai contoh. Dalam hal ini, ketiga ekspatriat dapat dikatakan cukup memberikan perhatian terhadap Kementerian Agama dan menganggap hal tersebut khas sebagai potret kehidupan beragama di Indonesia. "... obviously you have a Ministry of Religious Affairs in the country, it seems to, must be, look after the interest of Muslim majority" (Vladimir, 2016). Walaupun kemudian pada perkembangannya, berdasarkan situs resmi milik Kementerian Agama (2011), Kementerian Agama justru menjadi institusi yang mengurus urusan keagamaan di Indonesia secara

keseluruhan. Selain peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam negeri mengenai agama, pemerintah juga dianggap sebagai aktor yang bertanggungjawab memberikan edukasi kepada warga negara agar dapat meningkatkan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Menurut ekspatriat Australia, edukasi yang dimaksud adalah sosialisasi dan edukasi agama. Pemerintah dirasa perlu untuk meningkatkan upaya edukasi semacam itu karena para ekspatriat sepakat bahwa pemerintah Indonesia tidak cukup menaruh perhatian pada permasalahan intoleransi beragama. Pemerintah justru dilihat sebagai aktor politik yang tidak acuh terhadap berbagai diskriminasi yang dilakukan kepada kaum minoritas di Indonesia (Vladimir, 2016). Selain itu, untuk memperbaiki citra intoleran maka pemerintah dan pemuka agama dianggap mampu mensosialisasikan nilai-nilai agama yang moderat secara internasional. Hal-hal semacam itulah yang dianggap ekspatriat Australia mengganggu citra Indonesia di dunia internasional dalam hal menjaga toleransi antarumat beragama.

Persamaan Wacana Intoleransi Beragama Diantara Ekspatriat Perancis dan Australia

Persamaan persepsi antara kedua ekspatriat terletak pada bagaimana keduanya menghubungkan aspek historis Indonesia dengan fanatisme agama yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Baik ekspatriat Perancis maupun Australia sepakat bahwa hal-hal yang berhubungan dengan sejarah Indonesia berperan dalam membentuk cikal bakal intoleransi. Sebagaimana premis yang ditawarkan oleh Walzer (1997) bahwa isu agama dapat menjadi sumber konflik di tengah masyarakat ketika agama di suatu negara terkontaminasi oleh faktor nasionalisme, etnisitas, dan sejarah negara tersebut. Maka, sesuai dengan wacana yang berkembang di kalangan ekspatriat bahwa Indonesia tidak dapat terlepas dari aspek-aspek historisnya

yang akhirnya mempengaruhi kehidupan beragama di tengah masyarakat. Hal ini dapat dikaitkan dengan wacana para ekspatriat yang melihat faktor geografi, demografi, dan kultur telah membagi masyarakat Indonesia ke dalam kelompok-kelompok. Kelompok tersebut bahkan memiliki perbedaan praktik agama dan tingkat toleransi beragama. C. Park (2004:2) mengatakan bahwa agama dapat mendominasi suatu ruang dalam kelompok masyarakat melalui tradisi dan gaya hidup. Apabila dikaitkan dengan Indonesia, Islam dalam hal ini mendominasi beberapa daerah dan sekaligus menjadi mayoritas penduduk Indonesia. Akan tetapi di beberapa daerah, terdapat agama non-Islam yang juga mendominasi daerah tertentu sehingga praktik agamanya pun kemudian berbeda satu sama lain. Analisis kemudian menemukan bahwa persamaan wacana yang ada setidaknya disebabkan oleh persamaan keadaan di Perancis dan Australia. Tidak seperti Indonesia, PEW (2015) menyatakan bahwa masyarakat Perancis dan Australia sama-sama meletakkan agama sebagai hal yang tidak terlalu penting dalam kehidupan. Walau begitu, kedua negara tidak dapat terhindar dari sensitivitas agama berdasarkan dengan sejarah yang dialami keduanya. Baik ekspatriat Perancis dan Australia menyadari betul persamaan dan perbedaan antara negara asal dengan Indonesia dalam hal agama. Sebagai simpulan, persamaan wacana antara ekspatriat Perancis dan Australia yang mengaitkan geografi dan aspek historis Indonesia dengan fenomena intoleransi beragama terjadi karena terdapat kesamaan latar belakang historis sebagai seorang warga negara. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana kedua ekspatriat membandingkan situasi yang dialami Indonesia dengan negara asal masing-masing (Klotz dan Lynch, 2007: 7).

Selain dari aspek historis, persamaan persepsi diantara kedua ekspatriat juga terletak pada persepsi bahwa pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam isu-isu keagamaan

yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Kedua ekspatriat setidaknya membangun konstruksi wacana yang menempatkan pemerintah sebagai: (1) aktor pembuat kebijakan; (2) badan yang menaungi berbagai organisasi dan kelompok masyarakat; dan (3) badan yang mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat melalui media dan edukasi. Sebagai aktor pembuat kebijakan, kedua ekspatriat mengatakan bahwa pemerintah kerap mengeluarkan restriksi dengan alasan agama. Hal ini dilihat sebagai indikator bahwa Indonesia bergerak ke arah konservatime. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan Perancis dan Australia yang dikategorikan sebagai negara dengan pemerintah yang moderat dalam urusan agama. Peran pemerintah lainnya adalah sebagai badan yang menaungi ormas agama. Ekspatriat Australia dan ekspatriat Perancis yang secara rutin membaca berita dalam negeri mengaku cukup sadar dengan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh ormas agama terhadap kaum minoritas, seperti penghancuran gereja dan masjid di beberapa daerah serta berbagai penyerangan terhadap praktik agama yang dianggap aliran sesat. Selain melalui berita, terdapat ekspatriat yang mengaku pernah memiliki pengalaman langsung. Dalam kaitannya dengan hal ini, pandangan ekspatriat secara implisit memperlihatkan pandangan bahwa pemerintah toleran terhadap kelompok-kelompok intoleran. Tidak hanya itu, baik ekspatriat Perancis maupun Australia juga menilai bahwa media dan pemuka agama di berbagai sektor penting untuk menjadi kompanyon pemerintah dalam menggalakkan nilai-nilai toleransi beragama. Dan saat ini, upaya dari media dan pemuka agama di Indonesia dirasa masih kurang suportif. Persamaan wacana yang berkembang diantara kedua ekspatriat didasari oleh pengetahuan (*knowledge*) yang dimiliki setiap ekspatriat. Berdasarkan hasil wawancara, pengetahuan yang dimiliki baik ekspatriat Perancis maupun Australia mengenai hubungan pemerintah, kelompok beragama, dan

fenomena intoleransi beragama di Indonesia didapat dari pengalaman pribadi, diskusi yang dilakukan dalam suatu komunitas ekspatriat, dan melalui pemberitaan media. Persamaan persepsi diantara keduanya merupakan bentuk dari keterbatasan pengetahuan yang dimiliki ekspatriat Perancis dan Australia di Indonesia karena tidak pernah bersinggungan langsung dengan konflik agama yang pernah terjadi.

Perbedaan Wacana Intoleransi Beragama Diantara Ekspatriat Perancis dan Australia

Walaupun ekspatriat Perancis dan Australia sepakat bahwa faktor geografis dan historis Indonesia lainnya memberikan dampak tersendiri terhadap kehidupan beragama di Indonesia, tetapi wacana yang berkembang di kalangan kedua ekspatriat tidaklah sama mengenai hal tersebut. Perbedaan wacana yang berkembang diantara kedua ekspatriat terletak pada sinkronitas aspek historis Indonesia dan konflik-konflik keagamaan yang pernah terjadi dengan penyebutan Indonesia sebagai negara yang intoleran terhadap keberagaman agama. Wacana yang berkembang di kalangan ekspatriat Perancis ialah bahwa sejarah Indonesia telah berkontribusi terhadap pembentukan kelompok-kelompok radikal sebagai ilustrasi fenomena intoleransi beragama yang dilakukan oleh individu, kelompok tertentu, dan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, ekspatriat Perancis membenarkan bahwa Indonesia sedang mengalami fenomena intoleransi beragama. Sedangkan wacana yang berkembang di kalangan ekspatriat Australia justru sebaliknya. Pernyataan ekspatriat Australia tidak memperlihatkan hubungan linear antara sejarah Indonesia dengan konflik-konflik keagamaan yang terjadi untuk kemudian disebut sebagai perilaku intoleransi. Ekspatriat Australia lebih memilih untuk menggunakan kata tendensi dan konflik-konflik kecil (*small conflicts*) dibandingkan menggunakan kata intoleransi untuk menyebutkan

fenomena kehidupan beragama di Indonesia saat ini. Perbedaan persepsi antara ekspatriat Perancis dan Australia merupakan bentuk dari interaksi diskursif antara proposisi dan oposisi dari wacana intoleransi beragama di Indonesia. Berdasarkan teori milik Klotz dan Lynch (2007) bahwa produksi wacana tidak dapat terlepas dari subjektivitas partisipan. Ketika berada pada konteks historis, maka subjektivitas paling utama dipengaruhi oleh identitas sebagai *nation*. Mengemban identitas sebagai warga negara Perancis berpengaruh pada perhatian yang diletakkan dalam isu ini mengingat radikalisme dan ekstremisme agama telah menjadi perhatian Perancis di era kontemporer saat ini (PEW, 2015). Agama bagi masyarakat Perancis merupakan hal yang sangat sensitive, ekspatriat Perancis bahkan mengatakan bahwa intoleransi beragama juga menjadi masalah bagi Perancis. Berbeda dengan Australia yang walaupun sama-sama sekuler seperti Perancis, Australia justru merupakan negara yang bersih dari konflik-konflik antar kelompok beragama jika dibandingkan dengan Perancis dan Indonesia. Maka dari itu, masyarakat Australia dapat dikatakan tidak menaruh cukup perhatian pada isu intoleransi beragama.

Subjektivitas partisipan tidak hanya dipengaruhi oleh identitas ekspatriat sebagai warga negara, tetapi juga pengetahuan (*knowledge*) yang dimiliki. Dalam hal ini, ekspatriat Perancis dapat dikatakan memiliki lebih banyak pengetahuan tentang wacana intoleransi beragama daripada ekspatriat Australia. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Perancis menaruh perhatian yang cukup serius terhadap radikalisme dan ekstremisme agama. Hal ini terbukti dari berbagai kebijakan yang diupayakan untuk menghindarkan Perancis dari konflik agama. Hasil survei PEW (2015) dan wacana yang terproduksi dari ekspatriat Perancis menunjukkan identitas Perancis sebagai negara Eropa yang menaruh perhatian pada isu-isu agama, terutama Muslim. Secara berbeda, ekspatriat Australia

dapat dikatakan tidak menaruh perhatian yang cukup terhadap isu ini. Dalam tulisan yang dimuat oleh Stephen Blyth (2011: 81) bahkan menyorot para warga negara Australia yang dianggap tidak cukup sensitif terhadap permasalahan agama yang terjadi di Australia. Disebutkan bahwa masyarakat Australia menganggap bahwa konflik agama nihil terjadi di Australia. Maka, wajar kemudian ketika ekspatriat Australia mengungkapkan ketidaksetujuan bahwa kekerasan agama yang dilakukan oleh kelompok tertentu di Indonesia mengilustrasikan sikap intoleransi antarumat beragama. Walau begitu, ekspatriat Australia justru memiliki pengetahuan yang lebih mengenai keberadaan Kementerian Agama. Hal ini menjadi berbeda dengan konstruksi wacana yang berkembang di kalangan ekspatriat Perancis dimana ekspatriat Perancis tidak menyinggung pembahasan mengenai Kementerian Agama RI secara spesifik.

Perbedaan wacana juga terletak antara wacana yang berkembang di kalangan ekspatriat Australia dan Perancis yang tinggal di Bali dengan yang tinggal di Surabaya. Ekspatriat Perancis di Bali memperlihatkan kecenderungan untuk tidak setuju apabila pemerintah Indonesia dipandang sebagai aktor yang intoleran. Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh ekspatriat Australia yang tinggal di Bali dimana diungkapkan bahwa fenomena intoleransi beragama tidak benar-benar dirasakan langsung oleh ekspatriat di Bali. Hal ini menjadi berbeda dengan yang diungkapkan oleh ekspatriat Perancis dan Australia yang tinggal di Surabaya. Ekspatriat yang tinggal di Surabaya lebih akrab dengan peristiwa yang mengindikasikan adanya intoleransi, baik dalam hal agama maupun etnis. Perbedaan wacana yang berkembang antara ekspatriat Perancis dan Australia yang tinggal di Bali dengan yang tinggal di Surabaya ini selanjutnya dapat dijelaskan dengan menganalisis dari konteks spasial. Klotz dan Lynch (2007) menjabarkan bahwa bahwa konteks merupakan sesuatu yang

tetap dan tidak mudah berubah-ubah, termasuk didalamnya konteks spasial. Konteks spasial dapat secara jelas mempengaruhi konstruksi wacana yang berkembang karena setiap tempat memiliki situasi yang berbeda satu sama lain. Setelah dihimpun dari berbagai sumber, Bali merupakan daerah di Indonesia yang tidak pernah mengalami konflik kekerasan agama secara fisik. Beberapa sikap intoleransi berada pada tahapan ujaran kebencian dan konflik di sosial media. *Asia Foundation* (2015) bahkan merilis tabel yang memperlihatkan bahwa Bali tidak termasuk sebagai provinsi dengan frekuensi konflik kekerasan yang tinggi. Adapun tujuh provinsi yang disebutkan dalam tabel adalah Aceh, Maluku Utara, Maluku, Timor Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah. Walaupun Pulau Jawa juga tidak masuk dalam tabel tersebut, pengalaman langsung yang dialami oleh ekspatriat menjadi bukti nyata bahwa daerah di Pulau Jawa lebih rentan terjadi kekerasan yang mengindikasikan adanya intoleransi dalam kehidupan beragama di Indonesia.

Kesimpulan

Melalui sebuah penelitian diskursus yang dilihat dari kacamata konstruktivis dalam melihat permasalahan kekerasan agama di negara demokrasi, maka argumentasi awalnya adalah konstruksi wacana intoleransi beragama yang berkembang di kalangan ekspatriat Perancis dan Australia terkait dengan dua hal. Pertama, aspek historis yang berpengaruh dalam membentuk fanatisme di kelompok masyarakat tertentu. Kedua, relasi antara negara dan kelompok beragama di era demokrasi yang memberi ruang bagi ekspresi intoleransi. Argumentasi tersebut kemudian dielaborasi dalam bab-bab pembahasan selanjutnya setelah berhasil mewawancarai enam ekspatriat, yakni tiga ekspatriat Perancis dan tiga ekspatriat Australia. Bab II dalam penelitian ini menunjukkan variasi persepsi perorangan dari tiga ekspatriat Perancis. Wacana ekspatriat

Perancis menunjukkan bahwa sejarah Indonesia linear dengan berbagai konflik agama yang terjadi di Indonesia, namun hal tersebut diragukan menjadi indikator untuk menentukan Indonesia sebagai negara yang intoleran. Walau begitu, ekspatriat Perancis sepakat apabila beberapa oknum dan ormas yang mengatasnamakan agama sebagai aktor yang intoleran. Bab III penelitian ini menunjukkan satu pandangan yang relatif sama yang didapat dari hasil wawancara peneliti dengan tiga orang ekspatriat Australia. Berdasarkan pada pengalaman pribadi, ekspatriat Australia secara jelas mengatakan bahwa sejarah membagi masyarakat ke dalam kelompok agama dan daerah tertentu sehingga terdapat praktik agama ekstremis di beberapa tempat di Indonesia. Namun, ekspatriat Australia tidak setuju apabila Indonesia dikatakan sedang mengalami permasalahan toleransi beragama. Lalu Bab IV mengelaborasi pembahasan dengan membandingkan diskursus yang ada. Persamaan pertama terletak pada sejarah Indonesia yang membagi daerah-daerah Indonesia berdasarkan tradisi yang berbeda-beda sehingga menghasilkan praktik agama yang berbeda pula. Kedua, persamaan terletak pada wacana mengenai peran penting pemerintah Indonesia dalam meningkatkan toleransi beragama. Sedangkan perbedaan pertama terletak pada keterkaitan sejarah Indonesia, konflik agama, dan penyebutan Indonesia sebagai negara yang intoleran. Kedua, perbedaan wacana yang berkembang terletak pada knowledge mengenai keberadaan Kementerian Agama sebagai sebuah lembaga negara yang secara khusus mengurus urusan agama di Indonesia. Terakhir, perbedaan yang paling jelas terlihat tidak membagi pada sebatas identitas nasional, melainkan juga konteks spasial.

Penelitian ini setidaknya menyimpulkan lima hal. Pertama, konstruksi wacana intoleransi beragama yang berkembang diantara kalangan ekspatriat Perancis dan Australia terkait dengan dua hal, yakni aspek historis dan relasi negara dengan kelompok beragama. Kedua, konstruksi wacana yang berkembang di kalangan ekspatriat Perancis dan Australia memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan konstruksi wacana terletak pada bagaimana kedua ekspatriat menghubungkan wacana intoleransi beragama dengan sejarah Indonesia yang linear dengan praktik agama serta kehidupan beragama masyarakat Indonesia dan peran-peran pemerintah serta pemuka agama dalam meningkatkan toleransi antarumat beragama di Indonesia. Persamaan kemudian disebabkan oleh identitas negara asal dan keterbatasan knowledge yang dimiliki kedua ekspatriat. Sedangkan perbedaan konstruksi wacana ditemukan dalam penyebutan Indonesia sebagai negara yang intoleran. Dalam hal ini, baik ekspatriat Perancis maupun Australia merepresentasikan opini personal yang menyebabkan ketiadaan satu generalisasi. Akan tetapi, konteks spasial dan pengalaman pribadi memberikan sentuhan perbedaan yang dapat dijadikan pembanding diantara keduanya. Ketiga, dari konstruksi wacana yang ada dapat ditentukan bahwa tingkat toleransi beragama suatu negara dapat diukur melalui persepsi bottom-up, tidak hanya top-down. Keempat, penelitian ini membuktikan bahwa studi tentang diskursus dapat menghasilkan jawaban atas suatu permasalahan yang empiris. Kelima, peneliti menyatakan bahwa argumentasi penelitian benar adanya dan dapat diterima untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Daftar Pustaka

- [1] Amiraux, Valérie dan Marwan Mohammed. 2013. "France Needs To Start Facing Up To Islamophobia" [online] dalam

<http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jul/26/france-denounce-islamophobia-veil-riots> [diakses pada 30 Mei 2016].

- [2] Anonim., 2016. "Kajian Terhadap Pandangan Ekspatriat Perancis Dan Australia Di Bali Dan Surabaya". Wawancara oleh Esa. Secara langsung. Surabaya.
- [3] Asia Foundation. 2015. "In Indonesia, Database Tracking Violence Provides Insights on Preventing Conflict" [online] dalam <http://asiafoundation.org/2015/01/14/in-indonesia-database-tracking-violence-provides-insights-on-preventing-conflict/> [diakses pada 31 Juli 2016].
- [4] Bayuni, Endy. 2013. "Commentary: Religious Intolerance In Indonesia Officially Goes Up A Notch" [online] dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2013/12/02/commentary-religious-intolerance-indonesia-officially-goes-a-notch.html> [diakses pada 5 Juni 2016].
- [5] Black, Stephanie. 2016. "Konstruksi Wacana Intoleransi Beragama Di Indonesia: Kajian Terhadap Pandangan Ekspatriat Perancis Dan Australia Di Bali Dan Surabaya". Wawancara oleh Esa. Secara langsung. Surabaya.
- [6] Bourdin, Michel. 2016. "Konstruksi Wacana Intoleransi Beragama Di Indonesia: Kajian Terhadap Pandangan Ekspatriat Perancis Dan Australia Di Bali Dan Surabaya". Wawancara oleh Esa. Secara langsung. Surabaya.
- [7] Dowd, Robert Alfred. 2015. *Christianity, Islam And Liberal Democracy*. New York: Oxford University Press.
- [8] HRW., t.t., "Indonesia: Religious Minorities Targets Of Rising Violence" [online] dalam <https://www.hrw.org/news/2013/02/28/indonesia-religious-minorities-targets-rising-violence> [diakses pada 11 Desember 2015].
- [9] Kementerian Agama., 2016. "Sekretariat Jenderal" [online] dalam <https://www.kemenag.go.id/artikel/12458/sekretariat-jenderal> [diakses pada 31 Juli 2016].
- [10] Klotz, Audie dan Cecelia Lynch. 1007. *Strategies For Research In Constructivist International Relations*. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe.
- [11] Kine, Phelim. t.t., "President Yudhoyono'S Blind Side: Religious Violence In Indonesia" [online] dalam <https://www.hrw.org/news/2014/08/25/president-yudhoyonos-blind-side-religious-violence-indonesia> [diakses pada 11 Desember 2015].
- [12] Lamb, Kate. t.t., "Religious Violence Flares In Indonesia As Mob Torches Aceh Church" [online] dalam <http://www.theguardian.com/world/2015/oct/23/religious-violence-flares-in-indonesia-as-mob-torches-aceh-church> [diakses pada 11 Desember 2015].
- [13] Lenahan, Elizabeth. 2016. "Konstruksi Wacana Intoleransi Beragama Di Indonesia: Kajian Terhadap Pandangan Ekspatriat Perancis Dan Australia Di Bali Dan Surabaya". Wawancara oleh Esa. Secara langsung. Denpasar.
- [14] MacAskill, Ewen dan Toni Loughlin. 2010. "Barack Obama In Indonesia Appeals For Muslim Christian Tolerance" [online] dalam <http://www.theguardian.com/world/2010/nov/10/barack-obama-indonesia-religious-tolerance> [diakses pada 12 November 2015].
- [15] Meslin, Olivier. 2016. "Konstruksi Wacana Intoleransi Beragama Di Indonesia: Kajian Terhadap Pandangan Ekspatriat Perancis Dan Australia Di Bali Dan Surabaya". Wawancara oleh Esa. Secara langsung. Bali.
- [16] Neubert, Stefan dan Kersten Reich. 2002. *Toward A Constructivist Theory Of Discourse: Rethinking The Boundaries Of Discourse Philosophy* [pdf] dalam <http://www.unikoeln.de/hf/konstrukt/texte/download/constructivist%20discourse.pdf> [diakses pada 11 Mei 2016].
- [17] Park, C. 2004. "Religion and geography". Chapter 17 dalam Hinnells, J. (ed.) *Routledge Companion to the Study of Religion*. London: Routledge.
- [18] Pejovic, Vladimir. 2016. "Konstruksi Wacana Intoleransi Beragama Di Indonesia: Kajian Terhadap Pandangan Ekspatriat Perancis Dan Australia Di Bali Dan Surabaya". Wawancara oleh Esa. Secara langsung. Denpasar.
- [19] PEW Research Centre., 2015. "Religious restrictions among the world's most populous countries" [online] dalam <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/06/28/religious-restrictions-among-the-worlds-most-populous-countries-2/> [diakses pada 31 Juli 2016].
- [20] PEW Research Centre., 2015. "Americans are in the middle of the pack globally when it comes to importance of religion" [online] dalam <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/12/23/americans-are-in-the-middle-of-the-pack-globally-when-it-comes-to-importance-of-religion/> [diakses pada 31 Juli 2016].
- [21] Rogers, Benedict. 2012. "Indonesia's Rising Religious Intolerance" [online] dalam http://www.nytimes.com/2012/05/22/opinion/indonesias-rising-religious-intolerance.html?_r=0 [diakses pada 31 Oktober 2015].
- [22] Schonhardt, Sara. 2013. "Is Indonesia Still A Model Of Religious Tolerance?" [online] dalam <http://www.csmonitor.com/World/GlobalNews/2013/0531/Is-Indonesia-till-a-model-of-religious-tolerance> [diakses pada 12 November 2015].
- [23] Walzer, Michael. 1997. *On Toleration*. New Haven: Yale University Press.
- [24] Yongtao, Liu. 2010. "Discourse, Meanings and IR Studies: Taking The Rhetoric Of 'Axis Of Evil As A Case'". *Confines*.